

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di setiap negara. Upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tercermin dari pertumbuhan yang dapat dicapai, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat (Aswadi, 2016). Dengan demikian, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan terarah dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Peningkatan kesejahteraan ini antara lain dapat diukur dari kenaikan tingkat pendapatan nasional atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi setiap tahunnya (Sukirno, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses yang melibatkan daerah dan masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi dalam wilayah tersebut (Kuncoro, 2004). Maka dari itu, peran pemerintah bersama dukungan dari masyarakat sangatlah penting dalam mencapai kesejahteraan ekonomi suatu daerah dan menjadikan seluruh kegiatan pembangunan fokus pada upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu tolok ukur pertumbuhan ekonomi yaitu dengan adanya tingkat ketimpangan pendapatan (*income inequality*). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan pendapatan adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan antar individu tidak merata. Gini rasio menjadi salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat ketimpangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan menjadi isu penting bagi pembangunan setiap negara. Secara teoritis dan didukung oleh banyak penelitian empiris terbukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi berdampak pada ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan berkaitan dengan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara. Semakin tinggi ketimpangan pendapatan berarti distribusi pendapatan dalam masyarakat semakin tidak merata. Kondisi ini pada akhirnya akan memperbesar kesenjangan antara masyarakat dengan tingkat ekonomi relatif baik dengan mereka yang pendapatannya rendah.

Dalam kasus ini, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi daerah yang diteliti, karena ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta yang diukur dari tingkat gini rasio merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 0,420 persen (BPS, 2020). Provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi perlu diperhatikan lebih khusus dan penyebab dari ketimpangan di provinsi tersebut harus ditinjau lebih lanjut lagi, karena dengan penurunan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi D.I. Yogyakarta maka diharapkan dapat menurunkan tingkat ketimpangan distribusi

pendapatan (Aufa, 2019). Dapat dilihat dari Tabel 1.1, perkembangan tingkat gini rasio di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 sampai 2020 (BPS, 2021).

Tabel 1. 1
Tingkat Gini Rasio di D.I. Yogyakarta

Tahun	Gini Rasio
2010	0,44
2011	0,42
2012	0,43
2013	0,42
2014	0,43
2015	0,44
2016	0,42
2017	0,43
2018	0,44
2019	0,42
2020	0,43

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Jika dilihat dari tabel 1.1, tingkat gini rasio di Yogyakarta dari tahun 2010 sampai 2020 naik turun (fluktuatif). Pada tahun 2010, 2015, dan 2018 tingkat ketimpangan di D.I. Yogyakarta menyentuh angka paling tinggi, yaitu sebesar 0,44, sedangkan tingkat ketimpangan terendah sebesar 0,42 pada tahun 2011, 2013, 2016, dan 2019 (BPS, 2019).

Distribusi pendapatan merupakan suatu konsep tentang penyebaran antar seseorang dengan orang lainnya atau antara rumah tangga dalam masyarakat. Distribusi pendapatan biasanya diukur oleh dua konsep pokok, yaitu konsep ketimpangan absolut dan ketimpangan relatif. Ketimpangan absolut adalah konsep pengukuran ketimpangan yang didasarkan pada sebuah nilai mutlak, sedangkan ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya

pendapatan yang diterima seseorang atau suatu kelompok dengan total pendapatan yang diterima oleh masyarakat di daerah tersebut secara keseluruhan (Sukirno, 2006).

Distribusi pendapatan menjadi salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena distribusi pendapatan merupakan pengukuran dari kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan atau dengan kata lain pendapatannya tidak mencukupi biaya hidupnya, sedangkan kemiskinan relatif adalah perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi pendapatan di daerah atau wilayah (Sukirno, 2013). Maka dari itu, kemiskinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan. Seperti yang diungkapkan Arsyad (2017), bahwa masalah pemerataan pendapatan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah. Tabel 1.2 di bawah menunjukkan tingkat kemiskinan di D.I. Yogyakarta pada periode tahun 2010 sampai 2020 (BPS, 2021).

Tabel 1. 2
Tingkat Kemiskinan di D.I Yogyakarta (Persen)

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (Persen)
2010	16,38
2011	16,14
2012	15,88
2013	15,03
2014	14,55
2015	14,91
2016	13,34
2017	13,02
2018	12,13
2019	11,70
2020	12,28

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Tabel 1.2 menunjukkan tingkat persentase kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta. Dari tabel di atas tahun 2010 menjadi tingkat kemiskinan paling tinggi di D.I. Yogyakarta yaitu sebesar 16,38 persen, tetapi setiap tahunnya tingkat kemiskinan di Yogyakarta mengalami penurunan, sampai pada tahun 2019 berada pada 11,70 persen. Berdasarkan data BPS per maret 2020, D.I. Yogyakarta menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa dengan tingkat penduduk miskin sebesar 11,70 persen. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kemiskinan agar ketimpangan pendapatan yang terjadi semakin rendah.

Menurut Schultz dan Schultz (1982), perubahan pada modal manusia merupakan faktor dasar dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, oleh karena itu bekerja merupakan sumber utama dalam memperoleh suatu pendapatan bagi sebagian besar individu dalam masyarakat, di mana status

pekerjaan menjadi sumber utama penentu tingkat upah. Pendidikan menjadi faktor dalam menentukan tingkat upah seseorang dan memberikan kontribusi yang besar terhadap distribusi pendapatan masyarakat. Hal tersebut akan menghasilkan pergeseran dari pekerja berpendapatan rendah dengan pekerja tidak terampil menjadi pekerja berpendapatan tinggi yang terampil, pergeseran ini akan menghasilkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Disisi lain, menurut penelitian Istikharoh (2018) tentang pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta menyatakan bahwa jika tingkat pendidikan mengalami kenaikan, maka akan terjadi peningkatan pada ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dijelaskan karena penduduk D.I Yogyakarta lulusan SMA dan perguruan tinggi masih ada yang menjadi pengangguran. Maka dari itu, pendidikan menjadi faktor penting dalam memperoleh pekerjaan.

Menurut Yang dan Qiu (2016) kemampuan bawaan dan investasi keluarga dalam pendidikan awal memainkan peran penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan dan mobilitas pendapatan antar generasi. Tingkat pendidikan dapat terbentuk pada berapa lama mereka menempuh pendidikan atau pada tingkatan pendidikan tinggi, yang menjadikan rata-rata lama sekolah juga menjadi data pendukung dalam melihat pendidikan yang terjadi di suatu daerah. Tabel 1.3 di bawah menunjukkan rata-rata lama sekolah di D.I. Yogyakarta pada tahun 2019 (BPS, 2021).

Tabel 1. 3
Rata-Rata Lama Sekolah di D.I Yogyakarta (Tahun)

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (2019)	
	Laki-Laki	Perempuan
Kulon Progo	9,14	8,24
Bantul	10,07	9,04
Gunungkidul	7,88	6,46
Sleman	11,32	10,19
Yogyakarta	11,87	10,95

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel 1.3, dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah di D.I. Yogyakarta masih mengalami perbedaan yang cukup signifikan di setiap daerahnya, perbedaan gender juga mempengaruhi tingkat lama sekolah yang ada di setiap daerah. Rata-rata lama sekolah paling rendah terjadi di daerah Gunungkidul dengan gender perempuan selama 6,46 tahun pada tahun 2019, begitu juga dengan gender laki-laki, Gunungkidul menjadi daerah dengan rata-rata lama sekolah yang paling rendah selama 7,88 tahun pada tahun 2019. Berbeda dengan Kota Yogyakarta, baik laki-laki dan perempuan menempati rata-rata lama sekolah yang paling tinggi yaitu selama 11,87 tahun untuk laki-laki dan 10,95 tahun untuk perempuan. Perbedaan ini dapat memicu status pekerjaan saat mereka masuk ke angkatan kerja, yang dapat menyebabkan perbedaan penghasilan. Maka dari itu pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan.

Karl Mark (1787) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahap awal pembangunan akan meningkatkan tenaga kerja. Kenaikan tingkat

upah dari tenaga kerja akan berpengaruh terhadap kenaikan risiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga akan menurunkan permintaan tenaga kerja, akibatnya akan menimbulkan masalah pengangguran dan meningkatkan ketimpangan pendapatan. Maka dari itu, pengangguran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Pengangguran menurut Sukirno (1994) adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum memiliki atau memperoleh pekerjaan. Pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan pemerataan pendapatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya saing tenaga kerja. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan penerimaan daerah. Maka dari itu, tingkat pengangguran menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh besar terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Tabel 1.4 di bawah menunjukkan tingkat pengangguran di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 sampai 2020 (BPS, 2021).

Tabel 1. 4
Tingkat Pengangguran di D.I Yogyakarta (Persen)

Tahun	Tingkat Pengangguran (2020)
2010	5,69
2011	4,39
2012	3,90
2013	3,24
2014	3,33
2015	4,07
2016	5,61
2017	3,02
2018	3,35
2019	3,02
2020	4,57

Sumber : Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan tabel 1.4, dapat dilihat tingkat pengangguran di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Tingkat pengangguran di D.I. Yogyakarta masih fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2010, D.I. Yogyakarta mengalami tingkat pengangguran tertinggi sebesar 5,69 persen, tetapi pada tahun 2011 mengalami penurunan dari 5,69 menjadi 4,39 persen, dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dari 3,33 persen pada tahun 2014 menjadi 4,07 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di D.I. Yogyakarta belum merata, sehingga masih terdapat faktor produksi yang belum digunakan secara optimal dalam menunjang pembangunan distribusi pendapatan.

Dengan adanya dampak yang besar akibat adanya ketimpangan distribusi pendapatan, dibutuhkan pengkajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah ketimpangan distribusi pendapatan di D.I.

Yogyakarta. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan melihat dampak kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan maka rumusan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020 ?
2. Bagaimanakah pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020 ?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di D.I. Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Sebagai bahan untuk referensi bagi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi.
3. Bagi pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu informasi untuk dijadikan acuan dalam menetapkan kebijakan yang tepat guna mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.

1.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan studi terkait di atas, hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Kemiskinan berpengaruh positif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020.
2. Diduga Pendidikan berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020.

3. Diduga Pengangguran berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 – 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan ketimpangan distribusi pendapatan, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, variabel penelitian, dan teknik serta model data yang diteliti.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil analisa data, hasil penelitian yang diuji, dan hasil interpretasi dari hasil yang telah diuji.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, dan saran.